



# Lestarkan Budaya dan Profil Pelajar Pancasila

## Model dan Warna Pakaian Adat Akan Ditetapkan Pemprov DIJ

**JOGJA, Radar Jogja** - Pemerintah menerbitkan peraturan terkait seragam pakaian adat bagi para pelajar. Namun pelaksanaannya di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) telah berlangsung sejak 2016. Para pelajar diwajibkan mengenyakannya setiap Kamis Pahing dalam rangka mendukung pelestarian budaya sekaligus jadi profil pelajar Pancasila.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Kota Jogja Fajar Afrian mengatakan, kebijakan ini sesuai dengan Pergub DIJ No 75/2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara. "Untuk siswa di sekolah, dikembalikan kebijaksanaan masing-masing kepala sekolah," kata Fajar, kemarin (18/10).

Menurutnya, penggunaan pakaian adat bertujuan untuk menanamkan pemahaman terkait kebudayaan. Pakaian tradisional Jawa gaya Jogja berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Jogjakarta. "Untuk di sekolah dapat dikaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila," ucapnya.

Kepala Bidang Warisan Budaya Disbud Bantul Risman Supardi mengatakan, penggunaan pakaian adat bagi pelajar secara sederhana, diterapkan dalam wujud seragam batik di seluruh tingkat sekolah dari TK, SD, SMP, SMA/SMK. "Penerapannya sejak 2009," ujarnya.

Dipaparkan, alasan penggunaan batik sebagai seragam lantaran UNESCO telah



**TUNTUT ILMU:** Sejumlah siswa SMA di Kota Jogja pulang dari sekolah. Selain mengenakan seragam harian, mereka juga diwajibkan memakai pakaian adat setiap Kamis Pahing. Kebijakan ini juga akan diberlakukan secara nasional.

menetapkan, batik merupakan warisan budaya tak benda milik Indonesia. Kala itu, pencangannya dilakukan di Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul. "Tapi tidak ada sanksi bagi yang belum punya, biasanya disuruh memakai batik yang dipunyai," tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ menargetkan regulasi seragam dan pendanaan sekolah rampung November mendatang. Regulasi menekankan aturan

yang tidak membebani orangtua. Termasuk dalam seragam khas sekolah dan pakaian adat.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ, Didik Wardaya membenarkan penyusunan peraturan gubernur (pergub) menyoal seragam dan pendanaan sekolah. Regulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi pungutan dan jual beli seragam di sekolah. Nantinya, pergub akan mengatur seko-

lah tidak boleh membebani orangtua. "Minggu ini kami kembalikan lagi ke biro hukum. Masih proses pencermatan per pasal dan perkata. Mudah-mudahan bisa segera disahkan," cetusnya.

Selain mengatur seragam nasional, pergub nanti juga akan mengatur tentang seragam khas sekolah serta pakaian adat. Dijelaskan bahwa model dan warna pakaian adat nantinya akan ditetapkan oleh Pemprov DIJ. (fat/din/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005